



TANTANGAN TATKALA DAFTAR NIKAH ONLINE PADA LAMAN SIMKAH DI KUA BANJARMASIN BARAT

Mudzalifah¹

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: muzdalifah41@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 16-01-2026

Abstract

The development of digital technology has driven the transformation of public services, including marriage registration services through the Marriage Management Information System (SIMKAH). This study aims to analyze the challenges faced by the community and officers of the Office of Religious Affairs (KUA) in West Banjarmasin in implementing online marriage registration. The research method used is descriptive qualitative with an empirical approach through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the main obstacles include limited digital literacy among prospective brides and grooms, uneven internet network access, and administrative factors that require manual confirmation. Although SIMKAH is expected to improve efficiency and transparency, field realities show the need for assistance strategies and system optimization to ensure that the objectives of service modernization can be achieved.

Keyword: SIMKAH; KUA; Register for marriage online; Digital public services.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi layanan publik, termasuk dalam bidang pencatatan pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi masyarakat dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat dalam pelaksanaan daftar nikah online. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang muncul meliputi keterbatasan literasi digital calon pengantin, akses jaringan internet yang belum merata, serta faktor administratif yang memerlukan konfirmasi manual. Meskipun SIMKAH diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, realitas di lapangan menunjukkan perlunya strategi pendampingan dan optimalisasi sistem agar tujuan modernisasi layanan dapat tercapai.

Kata Kunci: SIMKA; KUA; Daftar nikah online; Layanan public digital.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik merupakan keniscayaan di era modern. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai bentuk inovasi layanan pencatatan pernikahan berbasis teknologi informasi. Kehadiran SIMKAH bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data pernikahan, sekaligus mengurangi praktik-praktik administratif manual yang sering menimbulkan keterlambatan atau kendala birokrasi. Dengan sistem ini, masyarakat diharapkan lebih mudah dalam

melakukan pendaftaran pernikahan tanpa harus berulang kali datang ke Kantor Urusan Agama (KUA).¹

Namun, implementasi SIMKAH di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai faktor menjadi tantangan, antara lain keterbatasan literasi digital masyarakat, kesenjangan akses internet, hingga kebiasaan administratif yang masih konvensional. Dalam konteks perkawinan, di mana prosedur dan dokumen memiliki nilai hukum serta religius yang tinggi, hambatan teknis maupun non-teknis dapat memengaruhi kelancaran layanan.² Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi teknologi tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur.

KUA Banjarmasin Barat sebagai salah satu lembaga yang menggunakan SIMKAH turut menghadapi kondisi tersebut. Sebagai wilayah dengan heterogenitas masyarakat, tingkat pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital beragam. Sebagian calon pengantin masih mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran secara online, sehingga memerlukan pendampingan intensif dari pihak KUA. Selain itu, keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah turut menjadi penghambat yang membuat proses pendaftaran tidak selalu sesuai dengan standar efisiensi yang diharapkan.

Berdasarkan Hasil temuan di lapangan, penelitian ini berfokus pada analisis tantangan tatkala daftar nikah online melalui SIMKAH di KUA Banjarmasin Barat. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah: bagaimana bentuk hambatan yang dihadapi masyarakat dan petugas KUA dalam penggunaan SIMKAH, serta strategi apa yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan implementasi layanan digital tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literasi digital masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan KUA, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem layanan pernikahan berbasis teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena tantangan pendaftaran nikah online melalui SIMKAH di KUA Banjarmasin Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan calon pengantin, petugas KUA, serta observasi

¹ Nasrullah Nasrullah et al., "EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM ADMINISTRASI PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2025): 729–36, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.5100>.

² Rina Anggraini, "Dinamika Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro)" (undergraduate, IAIN Metro, 2024), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9175/>.

langsung terhadap proses pendaftaran di laman SIMKAH, ditambah dokumentasi berupa regulasi dan arsip administrasi terkait. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara interaktif sehingga diperoleh pemahaman mendalam mengenai hambatan teknis maupun non-teknis dalam penerapan sistem. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³

PEMBAHASAN

Pelaksanaan daftar nikah online melalui SIMKAH di KUA Banjarmasin Barat menunjukkan dinamika yang kompleks antara harapan modernisasi layanan publik dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan sejumlah kendala utama yang dapat dikategorikan dalam aspek literasi digital masyarakat, infrastruktur jaringan internet, serta tata kelola administratif di KUA. Masing-masing aspek ini memberikan gambaran mengenai hambatan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam memengaruhi efektivitas implementasi SIMKAH.

1. Keterbatasan Literasi Digital Calon Pengantin

Salah satu hambatan dominan adalah rendahnya pemahaman calon pengantin mengenai penggunaan teknologi digital. Meskipun sebagian masyarakat, terutama generasi muda, cukup terbiasa dengan aplikasi daring, masih banyak calon pengantin yang kesulitan dalam mengakses laman SIMKAH, mengisi formulir elektronik, serta mengunggah dokumen persyaratan. Hal ini seringkali membuat proses pendaftaran tidak dapat dilakukan secara mandiri dan memerlukan bantuan dari petugas KUA, yang pada gilirannya menambah beban kerja administrasi.

2. Akses Jaringan Internet yang Belum Maksimal

Kendala lain yang muncul adalah keterbatasan jaringan internet, baik dari segi kecepatan maupun kestabilan sinyal. Beberapa wilayah di Banjarmasin Barat masih menghadapi masalah konektivitas, sehingga proses pendaftaran online sering terhambat. Gangguan ini tidak hanya menurunkan efektivitas sistem, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena prosedur yang seharusnya lebih cepat justru menjadi lebih lama. Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIMKAH sangat bergantung pada infrastruktur digital yang memadai.

3. Hambatan Administratif dan Budaya Birokrasi

³ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

Selain faktor teknis, terdapat pula hambatan administratif yang bersumber dari kebiasaan birokrasi yang masih konvensional. Meskipun pendaftaran dilakukan secara online, sebagian besar dokumen tetap harus diverifikasi secara manual di KUA. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih antara sistem digital dan prosedur manual. Di sisi lain, sebagian petugas KUA juga masih beradaptasi dengan sistem baru, sehingga pelayanan belum sepenuhnya berjalan sesuai standar efisiensi yang diharapkan.

Dari ketiga kendala tersebut, terlihat bahwa tantangan dalam implementasi SIMKAH bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan juga menyangkut kesiapan sumber daya manusia dan budaya birokrasi. Literasi digital masyarakat yang rendah, infrastruktur internet yang belum stabil, serta sistem administrasi yang masih konvensional saling berinteraksi dan memperkuat hambatan yang ada. Titik temu dari berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi layanan publik memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur, serta reformasi tata kelola administrasi agar sistem dapat berjalan efektif dan memenuhi tujuan transparansi serta efisiensi layanan pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan daftar nikah online melalui SIMKAH di KUA Banjarmasin Barat menghadapi tiga tantangan utama, yaitu keterbatasan literasi digital calon pengantin, keterbatasan akses jaringan internet, serta hambatan administratif akibat budaya birokrasi yang masih konvensional. Ketiga faktor ini saling berhubungan dan berimplikasi pada efektivitas pelayanan, sehingga tujuan modernisasi layanan publik berupa efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses belum sepenuhnya tercapai.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif, antara lain melalui program pendampingan digital bagi calon pengantin, peningkatan infrastruktur jaringan di wilayah layanan KUA, serta reformasi birokrasi yang mengintegrasikan sistem digital dengan verifikasi dokumen secara efektif. Selain itu, pelatihan rutin bagi petugas KUA mengenai pengelolaan SIMKAH perlu dilakukan agar pelayanan dapat berjalan optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan SIMKAH dapat benar-benar menjadi instrumen modernisasi layanan pernikahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi digitalisasi layanan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Rina. "Dinamika Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro)." Undergraduate, IAIN Metro, 2024. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9175/>.

Nasrullah, Nasrullah, Lisdiana Lisdiana, and Eva Novaria. "EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM ADMINISTRASI PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5, no. 2 (2025): 729–36. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.5100>.

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.